

EFEKTIVITAS PENGUMPULAN DOKUMEN UNTUK KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL MELALUI APLIKASI SIMPEL BKPSDM DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Ervie Nur Afifa Mukhlis¹, Ade Oki Pebiansyah², Tengku ine Hendriana³, Rini Ratnaningsih⁴, Andien Putri Azzahra⁴

Program Studi Administrasi Bisnis, Institut Digital Ekonomi LPKIA
Jl. Soekarno Hatta No. 456 Bandung

¹ervie@lpkia.ac.id, ²ade.oki@lpkia.ac.id, ³tengku@lpkia.ac.id, ⁴rini_ratnaningsih@lpkia.ac.id, ⁵andienpab02@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas aplikasi Simpel BKPSDM dalam proses pengumpulan dokumen untuk kenaikan jabatan fungsional guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya hambatan dalam proses pengumpulan dokumen, seperti kesulitan para guru dalam menggunakan aplikasi, akses internet yang tidak stabil, dan kesalahan dalam mengunggah dokumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi lapangan, studi literatur, wawancara, dan studi dokumenter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Simpel BKPSDM belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat beberapa hambatan. Penelitian ini menyarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi, meningkatkan stabilitas akses internet, dan meningkatkan koordinasi antara Dinas Pendidikan, kepala sekolah, dan guru.

Kata Kunci: *efektivitas, dokumen, jabatan fungsional, aplikasi simpel bkpsdm*

1. Pendahuluan

Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung yaitu Lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan pendidikan di wilayah Kabupaten Bandung. Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung mengacu pada Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 104 Tahun 2021 yang mengatur tentang Pedoman Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

Jabatan Fungsional merupakan sebuah tolak ukur kualitas seorang guru. Kenaikan jabatan fungsional merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas guru tersebut. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung telah menerapkan aplikasi Simpel BKPSDM sejak tahun 2021 untuk mempermudah proses pengumpulan dokumen kenaikan jabatan fungsional serta untuk menghemat waktu.

Permasalahan yang terjadi dalam pembahasan ini adalah masih terdapat beberapa hambatan dalam proses pengumpulan dokumen kenaikan jabatan fungsional menggunakan aplikasi Simpel BKPSDM

tersebut. Diantaranya masih banyaknya guru yang mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi tersebut, hal ini menyebabkan masih banyaknya guru yang belum melengkapi dokumen yang diperlukan. Hambatan yang muncul karena tidak lengkapnya dokumen yaitu dokumen yang tidak bisa diakses dikarenakan jaringan internet yang bermasalah, dokumen yang seharusnya berisi tentang riwayat jabatan, Penilaian Angka Kredit (PAK), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS) namun ternyata ketika dokumen tersebut dibuka bukan berisi tentang dokumen untuk kenaikan jabatan fungsional.

Berdasarkan latar belakang maka dapat disimpulkan bahwa 1. Apakah Aplikasi Simpel BKPSDM tersebut cukup efektif untuk digunakan?, 2. Apa saja hambatan yang dapat menyebabkan ketidaklengkapan dokumen untuk kenaikan Jabatan Fungsional? 3. Bagaimana proses pengumpulan dokumen untuk kenaikan Jabatan Fungsional melalui Aplikasi Simpel BKPSDM?

2. Metode Penelitian

Dalam tugas akhir ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian menggunakan jenis deskriptif analisis. Metode tersebut merupakan salah satu metode yang dalam penelitiannya menggunakan data yang telah dikumpulkan dalam bentuk uraian (deskripsi) mengenai kegiatan yang diteliti yaitu mengenai Efektifitas Pengumpulan Dokumen untuk Kenaikan Jabatan Fungsional melalui Aplikasi Sempel BKPSDM di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

Teknik pengumpulan data dalam pembuatan tugas akhir ini diselesaikan dengan menggunakan empat (4) teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan pengumpulan dokumen untuk kenaikan jabatan fungsional di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
2. Melakukan wawancara dengan salah satu pegawai di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung yaitu Bapak Rizky Maulana sebagai staff Pengelola Bahan dan Registrasi Sertifikasi.
3. Mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kenaikan jabatan fungsional di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
4. Membaca dan mempelajari buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian kali ini, buku yang dijadikan acuan adalah buku yang berjudul "Pola Pengembangan Karier Pustakawan Melalui Motivasi Kerja dan Pemahaman Teknis Jabatan Fungsional". Dan salah satu jurnal yang dijadikan acuan adalah "Efektivitas Pengelolaan Dokumen Haji dalam Meningkatkan Pelayanan Jamaah Haji pada Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat".

3. Kajian Pustaka

3.1 Pengertian Efektivitas

Efektif adalah hubungan antara keluaran dan tujuan yang dapat dicapai. Dikatakan efektif apabila proses operasional mencapai tujuan dan sasaran kebijakan. Semakin banyak output yang dibuat oleh setiap unit dalam organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, semakin efektif proses kerja unit tersebut. (Ahmad et al., 2021).

Gambaran seluruh siklus input, proses, dan output yang mengacu pada hasil guna dari suatu organisasi, program, atau kegiatan disebut efektif. Ini menunjukkan seberapa baik tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai dan mengukur seberapa berhasil suatu organisasi dalam mencapainya. (Kusumawati, 2023).

Efisiensi adalah istilah yang mengacu pada hubungan antara keluaran (output) yang dicapai dan masukan (input) yang diharapkan untuk organisasi atau individu tertentu. (Prasanna, 2023).

3.2 Pengertian Dokumen

Kata Dokumen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, n.d.-a) sebagai surat, baik tercetak maupun tertulis, yang dapat digunakan sebagai bukti informasi seperti akta kelahiran, surat nikah, atau perjanjian. Dalam (Henry, 2022).

Dokumen dapat dibuat dengan tujuan, tetapi juga dapat dibuat karena dimaknai sebagai dokumen. Artinya, selama seseorang memiliki makna yang fungsinya sebagai "docere" atau "doceo", sebuah objek dapat dianggap sebagai dokumen. Kata Latin "docere" atau "doceo" adalah etimologi dari kata Inggris "document". (Yudhawasthi, 2023).

Dokumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan informasi yang dikumpulkan, diterima, dan dikelola sebagai bukti dan informasi yang diperlukan oleh organisasi atau individu untuk memenuhi kewajiban hukum atau transaksi bisnis. (Awwaludin, 2023).

3.3 Pengertian Jabatan

Dalam struktur organisasi, jabatan mewakili peran, tanggung jawab, wewenang, dan hak pegawai negeri sipil dari sudut pandang struktural (seperti direktur dan sekretaris) fungsional (seperti penulis, peneliti, dan pemeriksa kesehatan). (Sekar Sari, 2022).

"Jabatan" berasal dari kata "jabat", yang dapat diartikan sebagai pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan atau organisasi yang terkait dengan pangkat dan posisi. (KBBI, n.d.-b)

3.4 Pengertian Jabatan Fungsional

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional. Mendefinisikan Jabatan fungsional sebagai jabatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang didasarkan pada keahlian, keterampilan, dan pengalaman, serta berkedudukan dalam suatu lembaga atau instansi yang melaksanakan fungsi tertentu. Jabatan fungsional memiliki tingkat dan pangkat yang ditentukan berdasarkan keahlian, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki oleh PNS yang mendudukinya. (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional, 2021).

Jabatan fungsional PNS terdiri dari jabatan fungsional keterampilan dan keahlian. Ini adalah jabatan teknis yang sangat penting dalam tugastugas penting pemerintah. Dalam buku yang dikutip oleh (Iswadi Syahrial, 2021).

Jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan pegawai negeri sipil sebagai bertanggung jawab untuk mendidik, mengajar, membimbing,

mengarahkan, 10 melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa di jalur pendidikan formal anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. (Alfiandy, 2021).

3.5 Pengertian Aplikasi

Aplikasi adalah program komputer, juga dikenal sebagai software, atau perangkat lunak, yang dirancang dan dibuat untuk melakukan perintah tertentu pada sistem tertentu disebut aplikasi. "Aplikasi" berasal dari kata bahasa Inggris "penerapan" dan "penggunaan", dan artinya secara harfiah berarti penerapan perangkat lunak atau software yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. (Dr. Juriono, S.Th.I., 2023).

Aplikasi adalah Aplikasi adalah kumpulan perangkat lunak yang dimaksudkan untuk menyelesaikan berbagai tugas, seperti permainan, sistem bisnis, layanan masyarakat, iklan, atau hampir semua proses yang biasa dilakukan manusia. Dalam buku yang dikutip oleh (Helmi Setyawan & Suprpto Munari, 2020).

3.6 Pengertian Aplikasi Sempel BKPSDM

Menurut Dedi Radi Analisis Data dan Informasi di BKPSDM Kabupaten Bandung, dalam kanal YouTube nya, Mendefinisikan Sempel BKPSDM (Sistem Informasi Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) merupakan aplikasi yang dibuat sebagai solusi untuk meningkatkan layanan dan kompetensi karyawan di semua departemen Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Aplikasi ini dikembangkan oleh Diskominfo Kabupaten Bandung dan pemerintah pusat. (Radi, 2023).

Merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung untuk mempermudah proses pengelolaan data kepegawaian, terutama untuk guru. Aplikasi ini diluncurkan pada tahun 2021 sebagai bagian dari upaya digitalisasi layanan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. (BKPSDM, 2021).

4. Hasil Penelitian

Pada bagian pembahasan ini berisi analisis terhadap data untuk menjawab pernyataan penelitian pada rumusan masalah. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung pembahasan akan dipaparkan berdasarkan metodologi berbentuk deskriptif analisis mengenai kegiatan subyek yang diteliti sesuai dengan pernyataan pada rumusan masalah di BAB I.

Adapun pembahasan pada bab ini diantaranya mengenai efektivitas kenaikan jabatan fungsional melalui aplikasi simpel BKPSDM, hambatan yang menyebabkan ketidaklengkapan dokumen, dan proses pengumpulan dokumen melalui Aplikasi Sempel BKPSDM.

4.1 Efektivitas Aplikasi Sempel BKPSDM

Berdasarkan teori efektivitas yang dijelaskan pada BAB II, efektivitas diukur berdasarkan seberapa besar output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini, output yang diharapkan yaitu terpenuhinya dokumen yang diperlukan untuk kenaikan jabatan fungsional dan tercapainya proses pengumpulan dokumen yang efisien dan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa aplikasi Sempel BKPSDM memiliki beberapa kelemahan yang dapat menghambat efektivitasnya:

1. Banyak guru yang mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi Sempel BKPSDM. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan sosialisasi yang memadai mengenai penggunaan aplikasi.
2. Akses internet yang tidak stabil di beberapa daerah menjadi kendala bagi guru dalam mengakses aplikasi Sempel BKPSDM dan mengunggah dokumen.
3. Beberapa guru mengalami kesalahan dalam mengunggah dokumen, sehingga dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan atau tidak dapat diakses.

Meskipun demikian aplikasi Sempel BKPSDM juga memiliki beberapa keunggulan:

1. Aplikasi Sempel BKPSDM mempermudah proses pengumpulan dokumen karena dapat diakses secara online dan dapat digunakan untuk menyimpan dan mengelola dokumen secara digital.
2. Aplikasi Sempel BKPSDM dapat menghemat waktu dalam proses pengumpulan dokumen karena guru tidak perlu lagi datang langsung ke kantor untuk menyerahkan dokumen.

Berdasarkan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Sempel BKPSDM belum sepenuhnya efektif dalam membantu proses pengumpulan dokumen untuk kenaikan jabatan fungsional. Meskipun aplikasi ini memiliki beberapa keunggulan, seperti kemudahan akses dan efisiensi waktu, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diatasi, seperti kesulitan penggunaan, masalah internet, dan kesalahan dalam pengunggahan dokumen.

4.2 Hambatan yang Menyebabkan Ketidaklengkapan Dokumen

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa hambatan yang dapat menyebabkan ketidaklengkapan dokumen untuk kenaikan jabatan fungsional:

1. Beberapa guru belum memahami dengan baik persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk kenaikan jabatan fungsional. Hal ini yang dapat menyebabkan guru tersebut tidak melengkapi dokumen yang dibutuhkan.

2. Beberapa guru mengalami kesulitan dalam mengakses dokumen yang dibutuhkan seperti dokumen Riwayat Jabatan, Penilaian Angka Kredit (PAK), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS). Kesulitan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti dokumen yang hilang, dokumen yang sulit ditemukan, guru yang bersangkutan lupa menyimpan dokumen dan guru yang bersangkutan lupa untuk memindai dari dokumen asli ke dokumen digital. Ini dapat menyebabkan proses pengumpulan dokumen untuk kenaikan jabatan fungsional menjadi terhambat karena harus mempersiapkan terlebih dahulu dokumen yang dibutuhkan.
3. Beberapa guru merasa kurang mendapat dukungan dari pihak terkait, seperti kepala sekolah atau pengawas dalam proses pengumpulan dokumen.

4.3 Proses Pengumpulan Dokumen melalui Aplikasi Simpel BKPSDM

Proses pengumpulan dokumen untuk kenaikan jabatan fungsional melalui aplikasi simpel BKPSDM dapat dijelaskan berikut:

1. Guru yang ingin mengajukan kenaikan jabatan fungsional harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala sekolah.
2. Kepala sekolah memverifikasi permohonan dan memastikan bahwa guru tersebut memenuhi persyaratan untuk mengajukan kenaikan jabatan fungsional.
3. Guru melengkapi dokumen yang dibutuhkan, seperti dokumen riwayat jabatan, Penilaian Angka Kredit (PAK), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS).
4. Guru mengunggah dokumen yang telah dilengkapi ke aplikasi Simpel BKPSDM.
5. Dinas Pendidikan melakukan proses verifikasi dokumen yang diunggah oleh guru.
6. Dinas Pendidikan memproses permohonan kenaikan jabatan fungsional dan menerbitkan surat keputusan kenaikan jabatan fungsional.

Proses pengumpulan dokumen untuk kenaikan jabatan fungsional melalui aplikasi Simpel BKPSDM melibatkan beberapa pihak, mulai dari guru, kepala sekolah, hingga Dinas Pendidikan. Meskipun aplikasi Simpel BKPSDM dapat mempermudah proses pengumpulan dokumen, masih terdapat beberapa hambatan seperti yang sudah dijelaskan pada poin hambatan diatas, seperti kurangnya pemahaman tentang persyaratan dokumen, kesulitan dalam mengakses dokumen, dan kurangnya dukungan dari pihak terkait.

5. Simpulan dan Saran

Berikut ini dikemukakan secara singkat hasil dari pembahasan bab sebelumnya. Semoga simpulan

dan saran ini mungkin dapat berguna bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Aplikasi Simpel BKPSDM belum sepenuhnya efektif untuk digunakan dalam proses pengumpulan dokumen untuk kenaikan jabatan fungsional. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pelatihan dan sosialisasi yang memadai mengenai penggunaan Aplikasi Simpel BKPSDM ini, akses internet yang tidak stabil di beberapa daerah dan kesalahan dalam mengunggah dokumen.
2. Masih terdapat hambatan yang dapat menyebabkan ketidaklengkapan dokumen untuk kenaikan jabatan fungsional. Hambatan tersebut meliputi kurangnya pemahaman guru tentang persyaratan dokumen, kesulitan dalam mengakses dokumen yang dibutuhkan, dan kurangnya dukungan dari pihak terkait.
3. Proses pengumpulan dokumen untuk kenaikan jabatan fungsional melalui Aplikasi Simpel BKPSDM melibatkan beberapa pihak, mulai dari kepala sekolah, guru, hingga dinas pendidikan. Meskipun aplikasi ini dapat mempermudah proses pengumpulan dokumen, masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas Aplikasi Simpel BKPSDM dan proses pengumpulan dokumen kenaikan jabatan fungsional:

1. Meningkatkan sosialisasi dan pelatihan penggunaan Aplikasi Simpel BKPSDM kepada seluruh guru yang terkait dengan pengurusan kenaikan jabatan fungsional. Pelatihan ini harus mencakup cara mengakses aplikasi, mengunggah dokumen dan memahami persyaratan dokumen yang dibutuhkan.
2. Meningkatkan stabilitas akses internet di wilayah Kabupaten Bandung. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan infrastruktur jaringan internet di daerah-daerah yang memiliki akses internet yang terbatas.
3. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara Dinas Pendidikan, kepala sekolah dan guru dalam proses pengumpulan dokumen. Dinas Pendidikan dapat menyediakan panduan yang jelas dan mudah dipahami tentang persyaratan dokumen dan proses pengumpulan dokumen melalui Aplikasi Simpel BKPSDM.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 15–23.
<https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3401>
- [2] Alfiantyi, A. C. (2021). Analisis Penetapan Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Guru Sman/Smkn Di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Tata Kelola Pendidikan*, 3(1), 15–22.
<https://doi.org/10.17509/jtkp.v3i1.40389>
- [3] Awwaludin, W. (2023). Efektivitas pengelolaan dokumen haji dalam meningkatkan pelayanan jemaah haji pada kantor kementerian agama kota jakarta pusat.
- [4] BKPSDM. (2021). SIMPEL BKPSDM. Situs Resmi BKPSDM.
<https://simplbkdpsdm.bandungkab.go.id/>
- [5] Dr. Juriono, S.Th.I., M. A. (2023). Panduan Praktis Penggunaan Aplikasi Hadis (C. M.S & T. Azhari (eds.)). Deepublish Digital.
- [6] Helmi Setyawan, Y., & Suprpto Munari, A. (2020). Panduan Lengkap Membangun Sistem Monitoring Kinerja Mahasiswa Internship Berbasis Web dan Global Positioning System (Y. Helmi Setyawan (ed.)). Kreatif Industri Nusantara.
- [7] Henry, H. (2022). Reliabilitas Dokumen Injil Sinoptik. *Kingdom*, 2(2), 172–188.
<https://www.ojs.sttkingdom.ac.id/index.php/Th eo/article/view/57>
- [8] Iswadi Syahrial, N. (2021). Pola Pengembangan Karier Pustakawan Melalui Motivasi Kerja dan Pemahaman Teknis Jabatan Fungsional (Abdul (ed.)). CV. Adanu Abimata.
https://books.google.co.id/books?id=kvBYEA AAQBAJ&pg=PA33&dq=Pen gertian+jabatan+fungsional&hl=en&newbks=1 &newbks_redir=0&source=g b_mobile_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ah UKewjb3Y_7zsWFAxXzXG wGHeVhAQEQ6wF6BAgMEAU#v=onepage &q=Pengertian jabatan fungsional&f=false
- [9] KBBI. (n.d.-b). Pengertian Jabatan. Website.
<https://kbbi.web.id/jabatan>
- [10] Kusumawati, E. (2023). Efektivitas Kerja Guru. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(3), 1487–1492.
<https://doi.org/10.54371/jiip.v6i3.1578>
- [11] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional, Pub. L. No. 17 (2021).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/170591/per menpan-rb-no-17-tahun-2021>
- [12] Prasanna, M. (2023). PENGUMPULAN DATA NASABAH PADA BAGIAN.
- [13] Radi, D. (2023). Penjelasan Tentang Sempel BKPSDM. Radi Family.
<https://youtu.be/jdD8oR3Q7Pg?feature=shared>
- [14] Sekar Sari, S. (2022). PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG LARANGAN RANGKAP JABATAN MENTERI DAN WAKIL MENTERI.
- [15] Yudhawasthi, C. M. (2023). Dokumen dalam perspektif ilmu komunikasi. *9008(105)*, 43–58.
<https://doi.org/10.55981/j.baca.2023.1126>